

**PERAN KELEMBAGAAN LOKAL DALAM PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA DI PPTSB (PERSADAAN
POMPARAN TOGA SINAGA DAN BORU)
WILAYAH SUMUT 1**

SKRIPSI

OLEH

**KRISTINA SINAGA
198510012**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/8/23

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : Kristina Sinaga
NPM : 198510012
JUDUL : Peran Kelembagaan Lokal Dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di PPTSB (Persadaan Pomparan Toga Sinaga dan Boru) Wilayah Sumut I.

Disetujui oleh,

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si **Agnita Yolanda, B.Comm, M.si**

Tanggal _____ Tanggal _____

Mengetahui,

Dekan Ketua Program Studi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si **Dr. Novita Wulandari, S.ST., M.Si**

Tanggal _____ Tanggal _____

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kristina Sinaga

NPM : 198510012

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non – exclusive Royalty – Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul: Peran Kelembagaan Lokal Dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di PPTSB (Persadaan Pomparan Toga Sinaga dan Boru) Wilayah Sumut I.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media /format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir /skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis /pencipta danm sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Juli 2023

Yang menyatakan



Kristina Sinaga

198510012

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumber nya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Agustus 2023




Kristina Sinaga
198510012

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : Kristina Sinaga
NPM : 198510012
JUDUL : Peran Kelembagaan Lokal Dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di PPTSB (Persadaan Pomparan Toga Sinaga dan Boru) Wilayah Sumut 1.

Disetujui oleh,

Pembimbing I **Pembimbing II**

Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos. M.Si **Agnita Yolanda, B.Comm. M.si**

Tanggal _____ Tanggal _____

Mengetahui,

Dekan Ketua Program Studi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si **Dr. Novita Wulandari, S.ST., M.Si**

Tanggal _____ Tanggal _____

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Agustus 2023

Kristina Sinaga
198510012

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kristina Sinaga

NPM 198510012

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non – exclusive Royalty – Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul: Peran Kelembagaan Lokal Dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di PPTSB (Persadaan Pomparan Toga Sinaga dan Boru) Wilayah Sumut 1.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media /format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir /skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis /pencipta danm sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Juli 2023

Yang menyatakan

Kristina Sinaga

198510012

ABSTRAK

PERAN KELEMBAGAAN LOKAL DALAM PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PPTSB (PERSADAAN POMPARAN TOGA SINAGA DAN BORU) WILAYAH SUMUT 1

Peran pemerintah daerah yang paling diharapkan terhadap kelembagaan lokal pemerintah yang baik yang mampu membangun kualitas SDM yang terampil dibidang iptek, inovatif terhadap perubahan dan memiliki tanggungjawab sosial yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai peran kelembagan lokal dalam pembangunan sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan terdiri dari informan utama, informan kunci dan informan tambahan, Teknik pengumpulan data penelitian dikumpulkan melalui teknik wawancara, teknik pengamatan atau observasi, teknik dokumentasi. Teori yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari peran menurut Soerjono Soekanto, indikator norma dan indikator perilaku. Hasilnya, bahwa peran pemerintah daerah tidak ada kedalam organisasi PPTSB Sumut 1 karena pemerintah daerah, kurang melibatkan anggota PPTSB Sumut 1 dalam kegiatan pemerintahan, serta anggota PPTSB masih tergolong sedikit.

Kata Kunci: Peran, Kelembagaan, Pembangunan SDM

ABSTRACT

The Role of Local Institutions in Empowering Human Resources in PPTSB

(Persadaan Pomparan Toga Sinaga and Boru)

North Sumatra Region 1

The role of local government is most expected of good local government institutions that are able to build quality human resources who are skilled in the field of science and technology, are innovative towards change and have high social responsibility. This study aims to describe the role of local institutional partnerships with local governments in human resource development. This study used a qualitative descriptive method and consisted of key informants, key informants and additional informants. Research data collection techniques were collected through interview techniques, observation techniques or observation, documentation techniques. The theory used in this study consists of roles according to Soerjono Soekanto, indicators of norms and indicators of behavior. The result is that the role of the local government does not exist in the North Sumatra PPTSB 1 organization because the local government does not involve North Sumatra 1 PPTSB members in government activities, and the number of PPTSB members is still relatively small.

Keywords: *Role, Institutional Partnership, HR Developmen*

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Kristina Sinaga, anak dari Bapak Arifin Sinaga dan Ibu Nursani Purba. Penulis lahir di Sihorbo tanggal 4 Maret 2000 di Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi. Penulis merupakan anak ke-3 dari 5 bersaudara.

Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar SD 033925 Sinampang, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi lulus tahun 2012. Kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 3 Sihorbo dan lulus pada Tahun 2015 melanjutkan Pendidikan di SMA N1 Siempat Nempu, Kabupaten Dairi lulustahun 2018. Setelah itu pada tahun 2019 Penulis melanjutkan Pendidikan Kuliah di Universitas Medan Area.

Penulis juga bergabung dalam organisasi eksternal kampus yaitu Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menjadi wakil sekretaris di komisariat UMA dan bergabung di Organisasi Internal yaitu IKAMITA (Ikatan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan) serta penulis mendapatkan Beasiswa dari Bank Indonesia di tahun 2021 mendapatkan Beasiswa dari Telkom di tahun 2022 . Penulis pernah mengikuti PHP2D (Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa) pada tahun 2020.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan hikmat dan kebijakan serta rahmat karunia-Nya sehingga penulis memperoleh kemudahan dalam Menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul “Peran Kelembagaan Lokal Dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di PPTSB (Persadaan Pomparan Toga Sinaga dan Boru) Wilayah Sumut 1.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu kritikan dan bimbingan penulis harapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan yang diberikannya terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M. Sc
Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si Selaku
Dekan Fakultas Ilmu Sosil dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr Novita Wulandari, S.ST, M. Si selaku Ketua
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Dr. Rudi Salam Sinaga, S. Sos, M. Si selaku

- pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan dan pengarahan dalam penyusunan dan pelaksanaan proposal skripsi.
5. Ibu Agnita Yolanda, B. Comm, M. Si selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak saran sehingga penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini.
 6. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Saya yang telah memberikan banyak saran sehingga penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini
 7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan informasi dalam mengajarkan materi perkuliahan.
 8. Pengurus PPTSB (Parsadaan Pomparan Toga Sinaga) Wilayah Sumatera Utara Utara (SUMUT) 1, yang ada di kantor PPTSB yang telah memberikan izin riset kepada saya dan membantu saya untuk memperoleh data yang ada di kantor PPTSB.
 9. Teristimewa kepada Bapak Saya Arifin Sinaga dan Mama Saya Nursani Purba yang tercinta yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang hingga saat ini, serta dukungan doa yang tiada henti-henti yang diberikan oleh kedua orang tua penulis beserta materi yang selalu diusahakan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini
 10. Abang Saya dan kakak beserta adek-adek yang tercinta yang selalu memberi semangat dukungan

doa yang tiada henti-hentinya, beserta materi yang selalu diusahakan Abang, Kakak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Untuk Kakak Risma dan kakak setia yang selalu memberi semangat dukungan doa yang tiada henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
12. Untuk Erik Morales Sihombing seperjuangan saya selama berada jauh dari orang tua khususnya yang telah memberikan banyak hal tentang kehidupan mendorong dan memberikan motivasi, Semangat terhadap penulis beserta masukan untuk terus berusaha dalam penyelesaian skripsi ini terhadap penulis.
13. Kepada Sahabat-sahabat Ku Penerima Beasiswa Bank Indonesia dan Beasiswa Telkom serta Organisasi GMKI UMA yang mendorong dan memberikan motivasi, Semangat terhadap penulis beserta masukan untuk terus berusaha dalam penyelesaian skripsi ini.

Medan, Agustus 2023

Kristina Sinaga

NPM: 198510012

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
ABSTRACT	
RIWAYAT HIDUP.....	
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	
Latar Belakang.....	4
1.1 Identifikasi Masalah	4
1.2 Pembatasan Masalah	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Defenisi Peran	7
2.2 Pemerintah Daerah	8
2.3 Good Governance	9
2.4 Kelembagaan Lokal	11
2.5 Perbedaan Kelembagaan	13
2.5.1 Interaksi Kelembagaan lokal	14
2.5.2 Keuntungan Kelembagaan Lokal	19
2.6 Penelitian Terdahulu	21
2.7 Kerangka Berpikir	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3.3 Informan Penelitian.....	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.5 Teknik Analisis Data.....	33
3.6 Instrumen Penelitian	34

3.7 Keabsahan Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	
4.1 Hasil	36
4.1.1 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	36
4.1.2 Visi Misi	37
4.1.3 Tujuan	37
4.2 Pembahasan.....	41
4.2.1 Perilaku	41
4.2.2 Norma	41
4.2.3 Peran Kelembagaan Lokal	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	
5.1 Kesimpulan	45
5.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA.....	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.7 Kerangka Berpikir..... 25



DAFTAR TABEL

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu.....21

Tabel 4.2 Jumlah Anggota PPTSB Wilayah Sumut 139

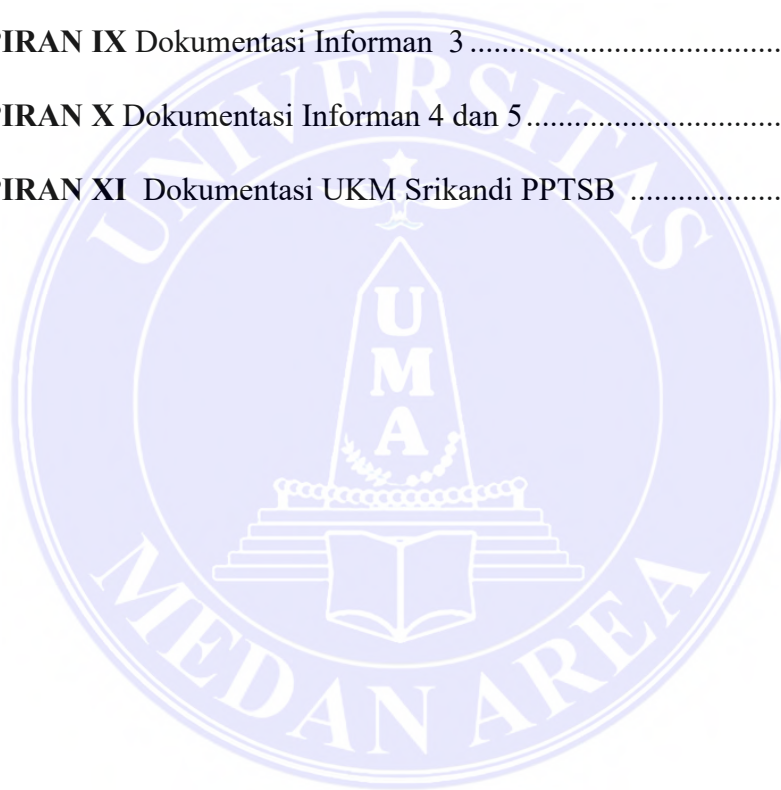
Tabel 4.3 Struktur Pengurus PPTSB Sumut 140



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I Hasil Observasi 50

LAMPIRAN II Pedoman Wawancara	52
LAMPIRAN III Kantor PPTSB/ Gedung Tosin	54
LAMPIRAN IV Ruangan PPTSB SUMUT	55
LAMPIRAN V Surat Izin Pengambilan Data Riset.....	56
LAMPIRAN VI Surat Selesai Pengambilan Data Riset	57
LAMPIRAN VII Dokumentasi Informan 1.....	58
LAMPIRAN VIII Dokumentasi Informan 2	59
LAMPIRAN IX Dokumentasi Informan 3	60
LAMPIRAN X Dokumentasi Informan 4 dan 5	61
LAMPIRAN XI Dokumentasi UKM Srikandi PPTSB	62





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan keanekaragaman termasuk didalamnya Suku, Agama, Ras (SARA). Karena keanekaragaman inilah maka bangsa Indonesia seringkali disebut negara majemuk, salah satu kemajemukannya adalah terdiri dari beberapa suku. Pulau Sumatera Utara berbatasan dengan Aceh disebelah Utara dengan Sumatera Barat serta Riau disebelah selatan.

Provinsi Sumatera Utara merupakan kampung halaman suku Batak, Yang hidup di pegunungan dan suku melayu atau di daerah pesisir timur. (Najwan, 2009) Batak adalah rumpunan suku yang mendiami Sebagian besar di wilayah Sumatera utara. Namun sering kali orang menganggap penyebutan Batak hanya pada Suku Toba, padahal Batak tidak hanya Suku Batak Toba, Suku Batak terdiri dari lima Subsuku yaitu: (1) Batak Toba, (2) Batak Karo, (3) Batak Simalungun (4) Batak Pak-Pak (5) Batak Angkola Mandailing.

Batak Toba adalah suku yang banyak bermukim di provinsi Sumatera utara, meskipun penyebarannya sudah hampir merata diseluruh Indonesia. Marga Orang Batak Toba sendiri tergolong banyak dan setiap marga memiliki sejarah garis keturunan masing-masing, salah satunya Marga Sinaga. (Sinaga, 2018)

Marga Sinaga adalah salah satu diantara marga-marga tertua didalam kumpulan marga batak Toba, Asalnya sendiri dari desa Urat Pulau Samosir. Marga Sinaga sudah cukup dikenal di umum, dan banyak sekarang marga sinaga yang berada di penjuru dunia.

Dari garis leluhur marga sinaga sendiri merupakan keturunan dari Si Raja Batak generasi kelima. Si Raja Batak melahirkan Guru Tateabulan, Guru Tateabulan melahirkan Tuan Sariburaja dan Sariburaja melahirkan Raja Lotung. Siraja Lotung inilah menjadi ayah dari Sinaga. SiRaja Lotung sendiri memiliki Anak Laki-laki ada 7, dan Anak Perempuan ada 1 diantaranya yang Bernama:(1) Toga Sinaga, (2) Toga Situmorang (3) Toga Pandiangan (4) Toga Nainggolan, (5) Toga Simatupang, (6) Toga Aritonang, (7) Toga Siregar, (8) Siboru Panggabean. (Sinaga, 2018)

Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah Perlunya Kerjasama pemerintah dan organisasi PPTSB. PPTSB (Persadaan Pomparan Toga Sinaga dan Boru) Yaitu, Perkumpulan marga yang menjunjung adat batak, menjalin persatuan dan mewujudkan Marga Sinaga Yang adil dan makmur, mempersatukan seluruh marga sinaga dan borunya, melaksanakan dan menerapkan dan menjunjung tinggi adat istiadat sesuai filosofi batak dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam acara suka maupun duka. Melaksanakan kegiatan sosial, tanggap dalam masalah yang dihadapi oleh setiap anggota PPTSB dan berperan aktif dalam membantu setiap anggota.

Pembangunan sumber daya manusia yaitu peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. suatu potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial. Atau sumber daya manusia yaitu kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seorang individu dan berperilaku dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungannya serta bekerja karena termotivasi oleh keinginannya untuk memenuhi kepuasannya. potensi yang di miliki oleh sumber daya manusia juga sangat berpengaruh terhadap upaya suatu organisasi dalam

mencapai target atau tujuannya. (Nurzaman, 2021)

Meskipun teknologi semakin maju dan terus berkembang, penyebaran informasi semakin mudah dan cepat, serta berbagai bahan baku semakin memadai tapi tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas maka tujuan organisasi sulit untuk tercapai. Dapat di katakan sumber daya manusia merupakan bagian yang penting untuk membentuk integritas dan mewujudkan visi dan misi suatu organisasi. Jadi untuk mencapai tujuannya, suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem, supaya sistem tersebut dapat berjalan sesuai yang semestinya. (Noor, 2016)

Sumber Daya Manusia di PPTSB sudah sangat banyak namun PPTSB kurang berperan, Melalui peran kelembagaan lokal dalam pemberdayaan Sumber daya manusia aset penting bagi organisasi, tentunya harus selalu berorientasi pada visi dan misi organisasi. Untuk mencapai visi dan misinya maka sumber daya manusia pada suatu organisasi harus memiliki karakteristik seperti motivasi, sikap, konsep diri, pengetahuan dan keahlian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana PPTSB (Persadaan Pomparan Toga Sinaga dan Boru), berperan dalam membangun di Kantor PPTSB/Gedung Tosin (Toga Sinaga) di Jalan Bunga Terompet, Medan Selayang Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 15, Juni 2022 pukul 16.20 Wib Di kantor PPTS, berdasarkan wawancara dengan Bapak: Drs. R.O. Sinaga, M. Pd, Bahwa Kurang nya pembangunan dan perangkulan sumber daya manusia dari pemerintah terhadap Lembaga masyarakat termasuk, PPTSB (Persadaan Pomparan Toga Sinaga dan Boru) di Sumut 1.

Untuk itu berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PERAN KELEMBAGAAN LOKAL DALAM PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PPTSB (PERSADAAN POMPARAN TOGA SINAGA DAN BORU) WILAYAH SUMUT 1”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penelitian mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Peran Kelembagaan Lokal Dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di PPTSB Wilayah Sumut 1
2. Kurangnya Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peran Kelembagaan Lokal Dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di PPTSB Wilayah Sumut 1

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini mencapai sasarannya, maka peneliti membatasi masalah yang diteliti. Melihat begitu luasnya ruang lingkup masalah yang teridentifikasi, maka penelitian ini di fokuskan pada:

- 1) Kelembagaan Lokal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Lembaga PPTSB (Persadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru) Diwilayah Sumut 1.
- 2) Faktor pendukung dan penghambat dalam penelitian ini adalah segala hal yang mengarah kepada penghambat atau kendala dan faktor pendorong yang bersal dari internal maupun eksternal organisasi.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Peran Kelembagaan Lokal Dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di PPTSB Wilayah Sumut 1
2. Apa Yang Menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peran Kelembagaan Lokal Dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di PPTSB Wilayah Sumut 1

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Kelembagaan Lokal Dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di PPTSB Wilayah Sumut
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat Peran Kelembagaan Lokal Dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di PPTSB Wilayah Sumut 1

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan gambaran nyata bagaimana Peran Kelembagaan Lokal Dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di PPTSB Wilayah Sumut 1

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan Sebagai masukan dan sumbangan pikiran bagi Peran Kelembagaan Lokal Dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di PPTSB Wilayah Sumut 1

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk merampungkan studi pada program studi Ilmu Pemerintahan untuk meraih gelar sarjana (S- 1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Defenisi Peran

Soerjono Soekanto (2002) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peranan merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto (2002) mencakup hal penting, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur

sosial masyarakat. Menurut Veithzal Rivai (2004) Peran di artikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu.

Miftha Thoha (2005) Peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Salam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi diantar mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk. Menurut Narwoko dan Suyanto (2010) peran dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi arah pada proses sosialisasi.
- 2) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
- 3) Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
- 4) Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

2.2 Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan

oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

2.3 Good Governance

Eksistensi pemerintahan yang baik atau sering disebut *Goodgovernance*. Secara sederhana, banyak pihak menerjemahkan *governance* sebagai tata pemerintahan. Tata pemerintahan di sini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (*government*) hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut *governance*.

good governance mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan negara. *Good Governance* bisa diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik atau positif. Letak sifat baik atau positif itu adalah manakala ada penerahan sumber daya secara maksimal dari potensi yang dimiliki masing-masing aktor tersebut atas dasar kesadaran dan kesepakatan bersama terhadap visi yang ingin dicapai. *Governance* dikatakan memiliki sifat-sifat yang *good*, apabila memiliki ciri-ciri atau indikator-indikator tertentu.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri atas:

- 1) Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya terjangkau.

- 2) Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- 3) Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjadi mudah dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Prinsip *good governance* tersebut secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tata pemerintahan yang bersifat terbuka (*transparency*), wujud nyata prinsip tersebut antara lain dapat dilihat apabila masyarakat mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan aparatur pemerintah, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah.
- 2) Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat, masyarakat yang berkepentingan ikut serta dalam proses perumusan dan/atau pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat sangat diperlukan pada setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut masyarakat luas.
- 3) Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi, wujud nyata dari prinsip profesionalisme dan kompetensi dapat dilihat dari upaya penilaian kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia. yang ada, dan dari upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia.

- 4) Tata pemerintahan yang cepat tanggap (*responsif*), aparat pemerintahan harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi/kondisi mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat

Pelaksanaan *good governance* kita dapat melihat bagaimana peran pemerintah dalam membangun sumber daya manusia bersama PPTSB (Persadaan Pomparan Toga Sinaga dan Boru) bila pelaksanaan hanya dibebankan pada pemerintah saja maka keberhasilannya kurang optimal dan bahkan memerlukan waktu yang Panjang.

2.4 Kelembagaan Lokal

Kelembagaan menurut Hendropuspito (1989) merupakan suatu bentuk organisasi yang secara tetap tersusun dari pola-pola kelakuan, peran-peran dan relasi sebagai cara mengikat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar.kelembagaan hadir di masyarakat karena kondisi masyarakat dipenuhi oleh berbagai aturan dan perilaku dengan melihat aturan-aturan tersebut. Untuk mengatur perilaku manusia maka kelembagaan sebagai media atau wadah dalam membentuk pola-pola yang telah mempunyai kekuatan yang tetap dan aktivitas guna memenuhi kebutuhan harus dijalankan melalui pola yang ada di kelembagaan.

Manusia akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dirinya dengan menggunakan atau berkelit dari aturan-aturan yang telah di bentuk melalui kelembagaan. Melalui kelembagaan yang dibuat untuk mengatur terhadap pola perilaku dan pemenuhan kebutuhann⁴ manusia, maka keberadaan kelembagaan akan memberikan kontribusi (keuntungan) bagi kehidupan masyarakat.

Perspektif sosiologi pengetahuan mencoba memberikan definisi kelembagaan sebagai bagian dari pengetahuan yang dimiliki individu dan masyarakat serta budaya. Pandangan ini melihat manusia sebagai makhluk yang aktif. Sehingga pandangan manusia terhadap semua pengetahuan yang ada di masyarakat khususnya kelembagaan sebagai hasil realitas sosial yang diciptakan. Dengan demikian realitas sosial merupakan konstruksi manusia dan hasil dari interaksi manusia, menata kembali hubungan sosial dalam pengetahuan sosial sehingga orang dapat mengambil bahwa pengetahuan itu sebagai perpanjangan dari pengetahuan biasa kita aktualisasikan di tingkat lokal dari kehidupan kita. (Koentjaningrat:2006)

Dengan demikian definisi kelembagaan lokal dapat dirumuskan sebagai kelembagaan yang berisi nilai-nilai lokal berupa norma, regulasi, dan kultural-kognitif yang menyediakan pedoman, sumber daya, dan sekaligus hambatan untuk bertindak bagi aktor. Fungsi kelembagaan lokal adalah menyediakan stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat, meskipun kelembagaan pun dapat berubah.

Kelembagaan lokal memberikan pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Berbagai norma yang hidup di masyarakat lokal termasuk norma-norma pasar beserta seperangkat regulasi menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk bertindak sebagaimana ia memahaminya (kultural-kognitif). Kelembagaan lokal tidak hanya berisi batasan-batasan, namun juga menyediakan berbagai kriteria sehingga individu dapat memanfaatkan apa yang masyarakat sukai. (Nurdin: 2017)

2.5 Perbedaan Kelembagaan Lokal dengan Organisasi.

Penggunaan istilah “*institution*” pada literatur berbahasa Inggris, ataupun istilah “lembaga” dan “kelembagaan” dalam literatur berbahasa Indonesia cenderung tidak konsisten dan tidak memperoleh pengertian yang sama antar ahli. Selain itu, penggunaan konsep ini seringkali bercampur dengan konsep “*organization*”. Pada bagian ini akan ditekankan perbedaan antara kelembagaan lokal dengan organisasi.

Menurut (Uphoff, 1986) bahwa “Organisasi adalah struktur yang mengakui dan menerima adanya aturan. Kelembagaan adalah kompleks norma-norma dan perilaku yang bertahan dari waktu ke waktu dengan tujuan bernilai kolektif (sosial) atau senilai bertujuan nilai sosial”. Dari penjelasan Uphoff diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi lebih bergerak pada bidang formal yang lebih modern sedangkan kelembagaan lebih pada informal dan tradisional dimana norma dan aturan menjadi pedoman menjalankan kelembagaan untuk tujuan bersama.

Ada empat cara untuk membedakan kelembagaan lokal dengan organisasi menurut (Syahyuti, 2010), adapun empat komponen pembedanya yaitu:

1. Kelembagaan lokal cenderung tradisional sedangkan organisasi cenderung modern.
2. Kelembagaan lokal berasal dari masyarakat itu sendiri sedangkan organisasi datang dari atas.
3. Kelembagaan lokal dan organisasi berada dalam satu kontinum dimana organisasi adalah kelembagaan yang belum melembaga.
4. Organisasi merupakan bagian dari kelembagaan.

Dalam konteks ini, organisasi merupakan organ dalam suatu kelembagaan lokal. Keberadaan organisasi menjadi elemen teknis penting yang menjamin beroperasinya kelembagaan lokal. Secara sederhana kelembagaan lokal dapat diartikan sebagai aturan main (*rule of the game*). Sedangkan Susanto melihat perbedaan kelembagaan dari segi komponen dan sifatnya, bahwa perbedaan kelembagaan lokal dengan organisasi dapat dianalogikan dengan sebuah komputer yang memiliki dua komponen utama yaitu piranti keras (*hardware*) dan piranti lunak (*software*), organisasi merupakan *hardware*-nya dan kelembagaan menjadi *software*-nya.

Berdasarkan sifatnya kelembagaan dibagi menjadi dua yaitu kelembagaan formal dan informal. Sedangkan berdasarkan mekanisme pembentukan, kelembagaan (organisasi) pada masa orde baru diatur oleh undang-undang, peraturan pemerintah dan sejenisnya. Sementara itu, kelembagaan lokal pada masa sekarang lebih merujuk pada aturan main seperti adat istiadat dan kebiasaan.

2.5.1 Interaksi Kelembagaan Lokal Dan Organisasi

Keberadaan organisasi saling berkaitan dan berinteraksi dengan teori kelembagaan lokal. Menurut Selznick (1948) bahwa “Organisasi diciptakan sebagai mekanisme instrumental untuk mencapai tujuan tertentu untuk sebagian variabel dan dari waktu ke waktu diubah menjadi lembaga” dampak tujuan dari aksi sosial dalam lingkungan organisasi (struktur berdasarkan tindakan rasional, mekanisme dan alat dalam membuat tujuan yang spesifik, karakteristik sosial anggota di sistem organisasi) merupakan bagian dari peraturan yang telah disepakati, sehingga lingkungan organisasi tersebut ditransformasikan pada kelembagaan melalui penanaman nilai (*infused with value*).

Proses transformasi nilai organisasi melalui kelembagaan lokal berpengaruh pada karakteristik struktur sehingga memiliki identitas yang berbeda. (Scoot, 2008). Dengan demikian, keberadaan organisasi sebagai kendaraan untuk mewujudkan nilai dan tujuan dalam mengembangkan teknologi sedangkan kelembagaan lokal menjadi struktur kekuatan manusia yang berkomitmen terhadap beberapa nilai, dengan menekankan pemeliharaan nilai untuk melindungi kekuatan di masyarakat. Sehingga subyek kelembagaan lebih mengarah pada menyebarkan tujuan dalam memperbaiki kelemahan teknologi dari organisasi.

Proses kelembagaan organisasi dilakukan dengan penanaman nilai melalui berbagai persyaratan. Melalui penanaman nilai maka memperoleh identitas struktur karakter yang berbeda dengan lainnya sehingga menyimpan nilai-nilai yang unik. Struktur dan tujuan organisasi yang ditransformasikan ke dalam kelembagaan dengan waktu yang relatif lama akan memunculkan komitmen dari anggota untuk berpartisipasi sehingga memunculkan kekuatan yang mengikat lingkungan dimana organisasi itu berada. Dengan demikian, struktur yang memiliki kekuatan menjadi komitmen nilai yang akan melindungi setiap kegiatan organisasi. Melalui proses kekuatan dalam organisasi akan mengidentifikasi cara memegang kekuasaan dan mampu melestarikan kekuasaan tersebut untuk mengikat anggota dan mencapai tujuan yang diharapkan. (Scoot, 2008).

Proses kelembagaan lokal memiliki kaitan dengan struktur organisasi dan perilaku sebagai konsep yang sangat berguna untuk meletakkan fokus proses kelembagaan yang paling baik untuk membentuk organisasi. Organisasi merupakan arena sosial dimana tindakan rasional berlangsung. Perilaku dalam organisasi pasti rasional, karena pilihan-pilihan dibatasi dan dipandu oleh aturan-

aturan.

Adanya organisasi akan mempercepat tercapainya kesetabilan tindakan. Hal ini merupakan jiwa dasar dari pelembagaan (*institutionalized*). Nee (2005) melihat interaksi kelembagaan dan organisasi dari sudut pandang lingkungan dimana lingkungan kelembagaan dikristalisasi pada organisasi. (Syahyuti, 2010) Sedangkan (Wibowo, 2011) menjelaskan bahwa sebuah organisasi dapat menjadi lembaga melalui proses pelembagaan jika terdapat beberapa persyaratan. Adapun syarat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya norma yang dihayati masyarakat sebagai anggota.

Sebagian besar warga sistem sosial menerima norma tersebut. Norma-norma tersebut telah dijiwai sebagian besar dari warga-warga sistem sosial tersebut, sehingga norma tersebut bersanksi.

2. Organisasi memberikan keuntungan bagi anggotanya.

Kelembagaan masyarakat yang merupakan teknologi (teknologi material dan organisatoris) memiliki peranan yang besar dalam mengatur keserasian hidup manusia dengan jalan memenuhi kebutuhan. Dengan kebutuhan yang begitu banyak sehingga masyarakat mengembangkan usahanya disekitar lingkungan masyarakat itu sendiri. Keberadaan usaha masyarakat tidak meninggalkan lembaga sebagai pemberi dan

penyedia kebutuhan yang telah ditetapkan.

3. Adanya stabilitas dan kapabilitas

untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan cara mengutamakan akuntabilitas, adanya partisipasi dari seluruh anggota dalam pengambilan keputusan, perencanaan serta evaluasi kegiatan, didukung oleh konsensus atau kesepakatan bersama serta adanya sanksi sosial.

Dari ketiga syarat di atas, maka proses pelebagaan pada organisasi dapat dicapai namun waktu yang dibutuhkan cukup lama hingga aturan dan tata cara menyalurkan serta memperoleh layanan dari organisasi itu diakui secara luas sebagai norma dan perilaku bersama (kolektif). Meskipun proses pelebagaan membutuhkan waktu yang cukup lama tetapi ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pelebagaan (*institutionalized*). Adapun faktor-faktor keberhasilan tersebut yaitu:

1. Frekuensi interaksi yang tinggi, diantara pihak-pihak di dalam suatu warga diperlukan sebagai sarana untuk mendiskusikan, menilai atau mengevaluasi kemapanan dan kecocokan setiap norma dan perilaku baru yang diperkenalkan.
2. Koordinasi interaksi (kerjasama yang baik), diantara unsur-unsur di dalam warga diperlukan sebagai sarana untuk menerapkan atau mengucicobakan penerapan norma-norma dan perilaku yang diperkenalkan.

Kerjasama yang baik antar pihak juga diperlukan dalam mengevaluasi kemapanan dan kecocokan norma dan perilaku baru itu.

3. Terdapat masalah bersama yang mendesak, sehingga diperlukannya pola dan aturan kerjasama baru. Tanpa adanya masalah mendesak tidak mungkin ada alasan yang cukup untuk mengembangkan dan memperkenalkan norma dan perilaku baru di dalam warga. Disinilah pentingnya dari upaya peningkatan kesadaran sebagai bagian penting dari upaya pengorganisasian dan pengembangan kelembagaan.
4. Terdapat dasar-dasar persamaan pola kebudayaan asal diantara para anggota warga akan sangat menentukan tingkat penerimaan dan kepatuhan mereka secara keseluruhan terhadap norma dan perilaku tertentu yang diperkenalkan. Latar belakang budaya seseorang akan sangat menentukan cara pandang terhadap suatu perilaku dan norma tertentu.
5. Tersediannya tokoh-tokoh pemimpin yang memenuhi syarat sangat menentukan keberhasilan proses pelembaaan. Hal ini mudah dipahami karena para pemimpin pada umumnya adalah sumber inspirasi atas normadan perilaku baru yang diperlukan. Para pemimpin juga menjadi acuan seluruh anggota

komunitas tentang penataan terhadap norma dan perilaku sehari-hari.

2.5.2 Keuntungan Menggunakan Kelembagaan Lokal

Menurut Esman and Uphoff (1984) sebagaimana yang diuraikan oleh (Wibowo, 2011) bahwa beberapa efisiensi yang akan didapat jika memanfaatkan peran kelembagaan lokal dalam pembangunan yaitu:

1. Lembaga lokal dapat meningkatkan efisiensi pembangunan karena kelembagaan dapat membantu menyediakan informasi yang akurat dan representatif (*accurate and representatif information*) tentang kebutuhan, prioritas dan kemampuan masyarakat serta umpan balik terhadap inisiatif dan pelayanan pemerintah.
2. Lembaga lokal dapat memfasilitasi kemampuan adaptasi program-program pembangunan (*adaptation of program*) terhadap variasi lingkungan fisik dan sosial yang beragam dan dengan demikian membantu meningkatkan efisiensi program.
3. Lembaga lokal dapat membantu meningkatkan efisiensi program melalui kemampuan mengembangkan komunikasi kelompok (*group communication*).
4. Lembaga lokal dapat membantu meningkatkan efisiensi program melalui sumber daya (*resource mobilization*) melalui kegiatan gotong royong.

5. Melalui lembaga lokal, pengetahuan lokal (*technical knowledge*) yang didapat dari pengalaman kolektif yang panjang dapat diolah dan dimanfaatkan bagi efisiensi dan keberhasilan pembangunan.
6. Pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas dan layanan (*utilization and maintenance*) pada umumnya juga dapat dilakukan dengan baik melalui keterlibatan lembaga lokal.
7. Melalui lembaga lokal dapat dikembangkan partisipasi dan kerjasama masyarakat dalam pelaksanaan program yang melibatkan perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan teknologi.

Dengan demikian, keberadaan lembaga lokal dapat membuat kegiatan komunikasi lebih efektif karena kekuatan-kekuatan yang ada di masing-masing individu dihimpun untuk menghadapi tekanan dan permasalahan dalam kehidupan. Pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing anggota akan menjadi sesuatu yang efektif untuk digunakan dalam penentuan sikap dan pengambilan keputusan dalam penanganan masalah atau kegiatan pembangunan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian perlu dilakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya, yang dijadikan acuan untuk

melihat dasar atau acuan berupa teori-teori atau temuan melalui hasil untuk dijadikan sebagai data pendukung. Penelitian terdahulu dapat dipakai sebagai sumber perbandingan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan dan juga agar mengetahui persamaan dan perbedaannya. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:



Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Rina Martha Errawati, peran karang taruna dalam pembinaan pemuda, 2014.	Kualitatif Deskriptif	Sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sama-sama menggunakan teori Peran.	Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini meneliti organisasi karang taruna yang ada	Terdapat Peran Karang Taruna, Dalam Pembinaan Pemuda Yaitu Peran Nya Sebagai Pemberi Dukungan Melalui Kegiatan Olahraga
2.	Ronny Setiawan, Anwar, Burhanudin Peran Karang Taruna Dalam Meningkatkan Aktvitas Kepemudaan Di Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, 2019.	Kualitatif.	Sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sama-sama menggunakan teori Peran.	Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini meneliti organisasi karang taruna yang ada	Peran Karang Taruna Dalam Meningkatkan Aktivitas Kepemudaan di Kelurahan Gunung Lingai kurang maksimal.
3.	Dini Destina Sari, Peranan Karang Taruna Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Pemda Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, 2016.	Deskriptif Kuantitatif	Sama- sama meneliti tentang organisasi.	Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan teori peranan.	Peranan Karang Taruna dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Pemuda, Peranan Karang Taruna Yaitu Usaha Kesejahteraan Bersama, Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Semangat

						Kebersamaan Dan Pemupukan Kreativitas GenerasiMuda, Berada Pada Kategori KurangBaik.
4	Radinal Muchtar,Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Orgabisasi Kepemudaan Di Kabupaten Pinrang. 2017	Kualitatif Deskriptif	Sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sama-sama meggunakan teori Peran, membahas pemerintah daerah.	Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini meneliti perbedaan .	ini	Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan pemerintahdaerah dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan diKabupatenPinrang terdiridari:Faktorpendukung yaitu: Tingginya minat pemuda dalam berorganisasi Semangat bekerja Dispaspor, Faktor Penghambat dinasbaru, pendataan yang kurang jelas
5	Rifqi Abdi Maksum ,Peran Organisasi Kepemudaan Gambleg Dalam Pembangunan Masyarakat Desa Banmelang Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep. 2020	Kualitatif Deskriptif	Sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sama-sama meggunakan teori Peran	Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini meneliti perbedaan dalam	ini	Pemuda harus mampu memberikan ide/gagasan yangdimiliki dalammemajukan Desa, potensi-potensi yangdimiliki pemudadapat membuat

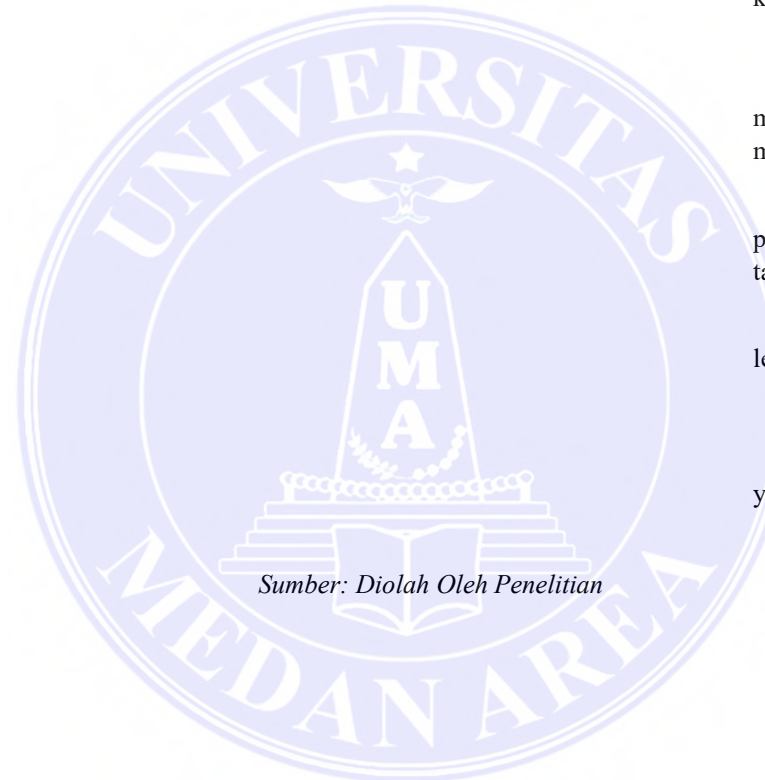
membangun
desa.

sebuah perubahan besar dalam struktur Negara atau daerahserta diharapkan mampu menghapus aktor-aktor pemerintahyang korupsi. Pemudawajib

hadir sebagai alternative solusi dalam memecahkan masalah bukan malah

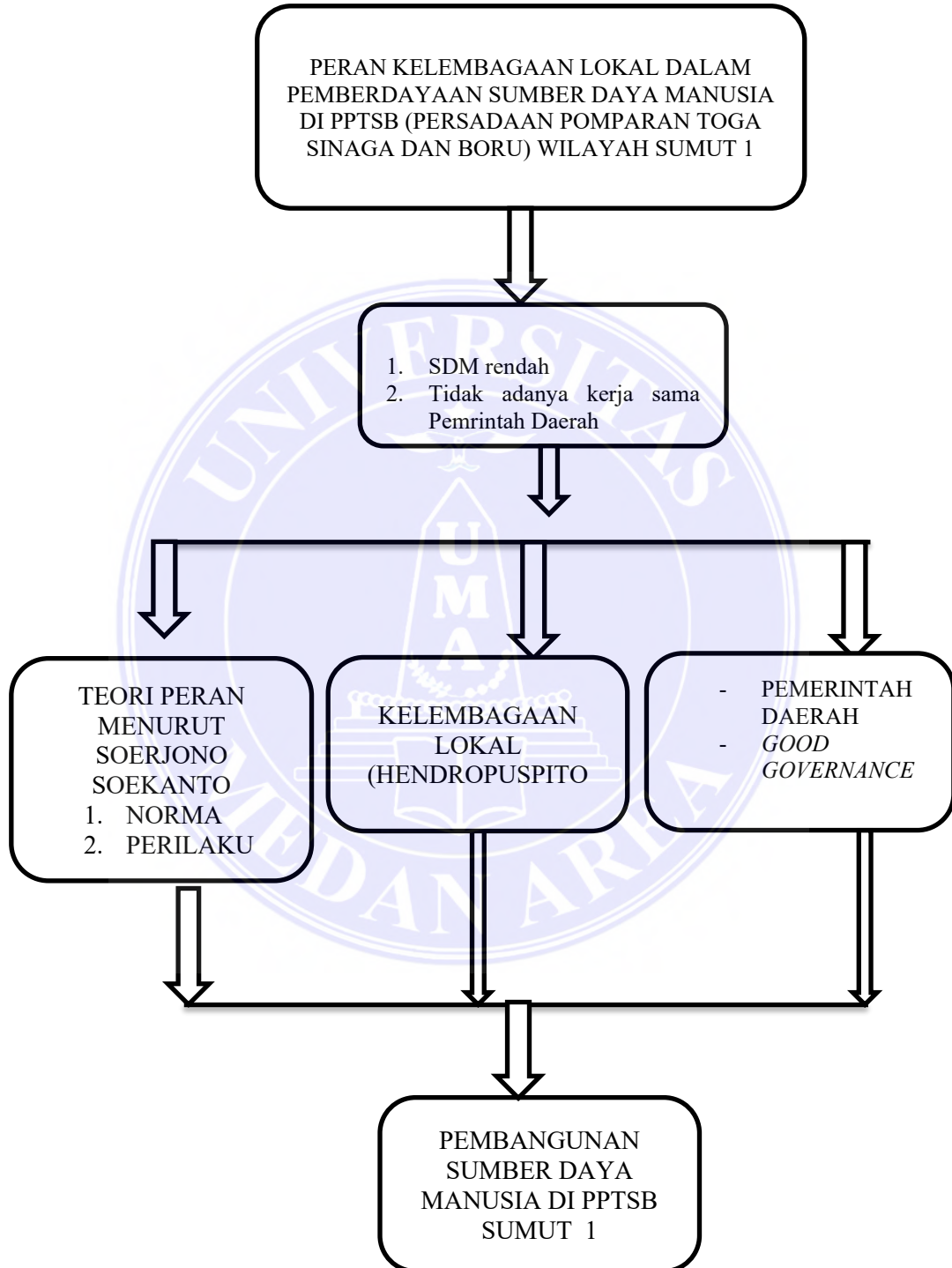
sebaliknya. Dengan semangat pemuda dalam mewujudkan tatanan

kehidupan masyarakat yang lebih baik, pemuda diharapkan mampu memberikan contohdan nilai-nilaikebudayaan yangtelah sirna.



2.7 Kerangka Berpikir

Gambar 2.7 Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2022)

Dari uraian skema diatas penulis menuraikan kerangka berpikir merupakan konsep untuk melakukan penelitian, untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan diawal proses pelaksanaan hingga akhir, agar hasil dari penelitian tidak bertolak belakang dilapangan. Dalam penelitian ini, peneliti membuat kerangka berpikir berkaitan dengan teori-teori yang berkisinambungan agar dapat menjawab masalah-masalah yang ada dirumusan masalah penulis. Persadaan Pomparan Toga Sinaga dan Boru (PPTSB) di Sumut 1 sebagai objek penelitian, dimana dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana peran kelembagaan dalam pemberdayaan Sumber daya Manusia di PPTSB wilayah Sumut dalam pembangunan sumber daya manusia dan apa faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan kelembagan lokal bersama pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian, secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan dengan menguji hipotesis. Menurut Usman (2009) Penelitian dengan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif bermaksud membuat penyandingan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.

Menurut Sugiyono (2015), menyatakan metode penelitian kualitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana penelitian adalah instrument kunci pengambilan sampel sumber data. Dalam penelitian kualitatif pada umumnya disusun berdasarkan masalah yang telah ditetapkan. Dengan demikian judul penelitiannya harus sudah spesifik dan mencerminkan permasalahan dan indikator yang akan diteliti.

Terdapat beberapa karakteristik dalam metode penelitian kualitatif, diantaranya yaitu Kualitatif.

- 1) Dilakukan dalam kondisis yang alamiah
- 2) Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, data yang terkumpul

bersifat atau berbentuk kata-kata, gambar, dan tidak menekankan pada angka

- 3) Penelitian kualitatif lebih menekankan pada suatu proses
- 4) Penelitian kualitatif ini lebih melakukan analisis data secara induktif.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di kantor PPTSB di Jalan Bunga Terompet Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara., waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Agustus-September 2022.

3.3 Informan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informannya. *Purposive sampling* merupakan penentuan informan tidak berdasarkan atas kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang saling berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian Informan yang dimaksud dalam suatu proses kegiatan penelitian ini adalah aparatur dan tokoh masyarakat. Pengertian informan merupakan subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam metode penelitian kualitatif, informan penelitian dibagi menjadi tiga diantaranya:

- a) Informan Kunci merupakan informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi atau fenomena

pada masyarakat secara garis besar, juga memahami tentang informasi utama. Misalnya pada unut sebuah organisasi, informan kuncinya adalah pimpinan organisasi tersebut. Jadi dalam penelitian ini informan kunci yang ditujukan

oleh penulis adalah Lembaga PPPSTB (Persadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru) Di Wilayah Sumut 1.

- b) Informan Utama merupakan orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan diteliti. Jadi dalam penelitian ini informan utama yang ditujukan oleh penulis adalah Pengurus Lembaga PPTSB (Persadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru) Di Wilayah Sumut 1.
- c) Informan Tambahan Informan Tambahan adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap dalam penelitian. Informan tambahan dapat memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan kunci dan informan umum yaitu anggota PPTSB (Persadaan Pomparan Toga Sinaga.dan Boru) di Wilayah Sumut 1.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Menurut Sugiyono (2012:224), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ialah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

menggunakan teknik wawancara, observasi, partisipasi dan dokumentasi:

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian terjadi dimana peneliti sedang berbincang-bincang dengan narasumber dengan tujuan menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan dan menggunakan teknik tertentu.

“Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dua orang, pewawancara sebagai yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban, (Moleong, 2007: 186). Dalam proses melakukan wawancara, langkah awal yang pertama kali dilakukan yaitu, memberitahu topik atau tema yang akan di bahas pada saat wawancara, setelah itu pihak instansi menentukan narasumber yang akan di wawancarai, kemudian penulis menyediakan pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber.

Setelah proses wawancara berlangsung penulis menulis jawaban yang sudah disampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber, setelah mendapatkan jawaban atau informasi yang disampaikan dari narasumber dan proses wawancara telah selesai, penulis tidak lupa untuk mengucapkan terimakasih kepada instansi yang terkait hingga kepada seluruh narasumber yang sudah memberikan informasi kepada penulis. Dalam penelitian ini narasumber wawancara ditujukan kepada Lembaga PPTSB (Persadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru) Di Wilayah Sumut.

2. Observasi

Menurut pendapat Sugiyono (2012: 166), observasi merupakan teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan. Instrumen yang digunakan peneliti adalah observasi nonpartisipan tidak terstruktur. Sifat instrumen yang tidak baku memudahkan peneliti untuk menggali informasi yang berkaitan dengan Peran Kelembagaan Lokal Dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di PPTSB (Persadaan Pomparan Toga Sinaga dan Boru) Wilayah Sumut 1.

Secara sederhana observasi dapat diartikan sebagai pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung kelokasi penelitian. langkah yang pertama kali dilakukan dalam teknik observasi ini adalah, datang ke lokasi penelitian yaitu di Kantor PPTSB (Persadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru) Di Wilayah Sumut 1. Dengan membawa surat pengantar dari Universitas sekaligus meminta Izin kepada pihak instansi yang terkait untuk melakukan pengumpulan data terkait dengan Kemitraan Kelembagan Lokal, Bersama Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Studi Kasus Lembaga PPTSB (Persadaan Pomparan Toga Sinaga Dan Boru) Di Wilayah Sumut

3. Partisipatif

Penelitian partisipatif merupakan peneliti yang terlibat dengan

kegiatan sehari-hari orang yang sedang di amati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan partisipan, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode mengkaji dan mengolah data dari dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya dan mendukung data penelitian. “Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri historis, (Burhan, 2008). Teknik pengumpulan data dalam metode dokumentasi sering di contoh kan seperti dengan Foto-foto baik dalam acara tertentu maupun dalam penelitian. Namun perlu di cermati bahwa yang dimaksud dokumentasi tidak hanya foto-foto saja diantaranya, gambar, tulisan, buku, monografi, dan dokumen. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah, peraturan, kebijakan. Langkah yang pertama kali dilakukan oleh dalam teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ini adalah, foto bersama dengan sejumlah narasumber yang bersangkutan hingga mengambil foto-foto di instansi sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan.

3.5 Teknik Analisi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data seperti

wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi seperti rekaman audio/video serta foto dengan cara mengorganisasikan data dan memilih data yang terpenting serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain. Analisis data dilakukan

dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit, memilih mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat di ceritakan kepada orang lain. Miles dan Huberman (2018) membuat konsep yang dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data Reduksi data berarti merangkum dan memfokuskan kepada hal-hal penting bagi penelitian (Sugiyono, 2018). Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Proses reduksi data yang penulis lakukan yaitu membuat daftar pertanyaan agar mempermudah penelitian ketika dilapangan.
2. Penyajian data Penyajian data dapat merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Dalam penyajian data ini peneliti menyajikan data dalam bentuk teks naratif dengan struktur yang sistematis dan tersusun menjadi

beberapa bagian. Dalam penelitian ini data yang disajikan adalah mengenai etika kritik di ruang publik media sosial instagram.

3. Penarikan kesimpulan Penarikan kesimpulan mengenai etika kritik di ruang publik media sosial instagram dilakukan setelah melakukan reduksi data dan penyajian.

3.6 Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2018) yang dikatakan instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus diuji (divalidasi) seberapa jauh peneliti siap untuk melakukan penelitian yang selanjutnya akan terjun secara langsung kelapangan. Adapun instrumen selain peneliti itu sendiri adalah pedoman wawancara dan dokumentasi (alat perekam dan kamera).

3.7 Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis Triangulasi dipilih sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepercayaan (kreadibilitas) sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Analisis Triagulasi sama dengan menganalisis jawaban dari informan dengan cara meneliti kebenarannya menggunakan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia. Disini, jawaban subjek akan cross – check dengan dokumen atau bahan referensi yang sudah ada (Kriyantono, 2014).

Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode adalah:

1. Triangulasi sumber data yaitu membandingkan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda-beda. Peneliti membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi serta akan melihat dokumen resmi catatan dan atau tulisan pribadi serta

gambar/foto yang menghasilkan bukti yang berbeda sehingga akan memberikan pandangan yang lain dari fenomena yang sedang diteliti.

2. Triangulasi metode yaitu usaha untuk mengecek keabsahan data dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data dengan tujuan untuk mendapatkan data yang relevan. Peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi metode digunakan jika data yang diperoleh dari informan penelitian diragukan kebenarannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Kelembagaan Lokal Dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di PPTSB Wilayah Sumut 1 belum optimal dengan jumlah anggota yang masih tergolong sedikit untuk bergabung kedalam PPTSB Sumut 1.
2. faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peran Kelembagaan Lokal Dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di PPTSB Wilayah Sumut yaitu : budaya, adat istiadat marga Sinaga yang kuat sedangkan faktor penghambatnya masih banyak marga sinaga yang belum bergabung kedalam PPTSB Sumut 1.

5.2. SARAN

- 1) Ketua Umum Persadaan Pomparan Toga Sinaga dan Boru (PPTSB) di Wilayah Sumut 1, disarankan untuk Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah khususnya di wilayah Kota Medan dan Sekitarnya yang di dukung dengan implementasi program kerja, baik berupa pelatihan, seminar, workshop serta keterlibatan PPTSB di berbagai event, khususnya terkait kearifan lokal.
- 2) Pemerintah Daerah Kota Medan, khususnya kelurahan Jalan Bunga Terompet, Medan Selayang disarankan untuk melibatkan PPTSB Sumut 1, dalam kegiatan kemasyarakatan, baik program

bidang sosial berupa sosialisasi, musyawarah tingkat kelurahan dan kecamatan, program pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di kelurahan Jalan Bunga Terompet, Medan Selayang dan lainnya.

- 3) Pengurus PPTSB Sumut 1 harus Menjalankan Visi Misi PPTSB, yang Mempersatukan seluruh marga Sinaga dan borunya yang berada di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya dalam sebuah wadah PPTSB.
- 4) Pengurus PPTSB harus bekerja sama dan Ikut berperan-serta mendukung pemerintah dan terlibat dalam mewujudkan masyarakat yang adil, Makmur dan sejahtera.
- 5) Dengan Melaksanakan, menerapkan dan menjunjung tinggi adat- istiadat sesuai filosofi Batak dalam setiap kehidupan sehari-hari termasuk dalam acara suka maupun duka bagi Keluarga Sinaga tanpa memihak satu sama lain.
- 6) Melaksanakan kegiatan sosial, tanggap dalam masalah yang dihadapi oleh setiap anggota PPTSB dan berperan aktif dalam membantu setiap anggota.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adnyani, Ni Ketut Sari. 2018. *Hukum Pemerintahan Daerah dalam PerspektifKajian Pengelolaan Potensi Lokal*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Aswasulasikin, 2007, *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pendidikan Kajian Fenomenologi di Sekolah Dasar*. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Bungins, Burhan. 2008. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hanif, Nurcholis. 2009. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Koentjaraningrat. 2006. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Kusdarini, Eny. 2019. *Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dalam Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Uny Press.
- Manan, Bagir. 1994. *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UU 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marbun, S.F. 2014. *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Narwoko, Dwi dkk. 2010. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan Edisi ketiga*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Nurdin, Ismail. *Norma, Konsep, dan Praktek bagi Pengelenggara Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Sinaga, Abertus. 2018. *Toga Sinaga dan Perkembangannya*. Jambi: PPTSB.
- Sinaga, Richard. 1996. *Leluhur Marga-Marga Batak Dalam Sejarah, Silsilah, dan Legenda*. Jakarta: Dian Utama.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudiantini, Dian. 2020. *Leaders and Culture - Bagaimana Strategi MeningkatkanKinerja Layanan Publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Toha, Mita. 2005. *Perilaku Organisasi, Konsep, dan Aplikasinya*. Jakarta: PTRaja Grafindo Persada

Ubaedillah. 2015. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Kencana

Veithzal, Rivai. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Widjaja. HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Jurnal dan Skripsi

Abdi Rasoki Pulunga, 2019, *Analisis Inspektorat Sebagai Apip (Apartpengawasan*

Intern Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Serdang Bedagai. Medan: Fakultas Ilmu sosial dan politik, Universitas Medan Area.

Alwi Hashim Batabara, 2006, *Pelayanan Publik Sebagai Pintu Masuk Dalam Mewujudkan Good Governance jurnal Analisis Administrasi danKebijakan*.

Chintya Maolastrya Sirait 2006, *Perbedaan Perilaku Asert Pada Mahasiswa SakuBatak Toba Dan Saku Skripsi*. Medan: Fakultas Pakologi, UniversitasMedan Area.

Dewi Kumiasih, 2002, *Model Skala Prioritas Pembangunan Kota Bandung Berbasis Good Governance Makara, Sosial Humor Indonesia*. Bandung:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer.

Errawati, Rina Martha. 2014. *Peran Karang Taruna Dalam Pembinaan Pemuda (Studi Deskriptif Pada Kegiatan Karang Taruna Karya Muda(Kartayudha) Di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)*.Jember: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Ida Basaria, 2008, *Pemarkah Keaspekan Dalam Bahasa Batak Toba*, FakultasSastra Universitas Sumatera Utara

Lilik Mas Roro, 2017, *Otonomi Daerah Malang, Intelegensi Media*.
Munawar Noor, 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Universitas PGRI Semarang*
Muhammad Ramlan, 2010, *Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan KualizarPermukiman Dikawasan Pusat Kota Palu*, Fakultas Teknik JuanArsitektur Universitas Tadulaks

- Neneng Siti Maryam, 2016, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Bandung*, Program Studi Administrasi Bisnis, Politeknik Kridatama.
- Nofianti Leny, 2015, *Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah*.
Pekanbaru.
- Oswita Silalahi, 2005, *Makna dan Konteks dalam Bahasa Batak Toba*, Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sinaga, Rudi. 2016 “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara”. 79 *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*.
- Sari, Dini Destina. 2016. *Peranan Karang Taruna Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Pemda Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro*. Bandar Lampung: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
- Sembel, Tesyalom. 2022. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)*.
Manado: FISIP-Unsat.
- Setiawan, Ronny, Anwar, Burhanudin. 2019. *Peran Karang Taruna Dalam Meningkatkan Aktivitas Kepemudaan Di Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda (Vol. 7 No. 2)*. Samarinda: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.
- Sihombing, Marion. 2005. *Pengembangan Kawasan melalui paradigma pencanaan partisipatif* *Jurnal Analisa Administrasi dan Kebijakan*.
- Usman, Pelly. 2005. *Pengukuran Intensitas Konflik Dalam Masyarakat Majemuk*.
Medan: Universitas Negeri Medan.
- Visal, Solang, 2014, *Good Governance Institut Agama Islam Negeri: Manado*.
- UU dan Internet**
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5.
- Daerah Pemerintahan daerah sesuai Pasal 1 UU No. 22 Tahun 1999.
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
- <https://trimongangalah.wordpress.com/2013/10/25/>

LAMPIRAN I
PEDOMAN OBSERVASI

**PERAN KELEMBAGAAN LOKAL DALAM
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI PPTSB (PERSADAAN POMPARAN TOGA
SINAGA DAN BORU) WILAYAH
SUMUT 1**

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi:
Lokasi penelitian di Kantor PPTSB/Gedung Tosin (Toga Sinaga) di Jalan Bunga Terompet, Medan Selayang Kota Medan, Sumatera Utara
2. Fasilitas, sarana dan prasarana:
Fasilitas, sarana dan prasarana di Kantor PPTSB/Gedung Tosin (Toga Sinaga) yaitu Kantor penguru, ruang tunggu, wisma Tosin dan tempat parkir kendaraan.
3. Pelaksanaan kegiatan/program:
Pelaksanaan kegiatan program di Kantor Kepala Desa Pulau Gambar
4. Respon/ Sikap:
Respon/ Sikap pegawai di PPTSB/Gedung Tosin (Toga Sinaga) ramah dan santun serta membantu mencari data apa yang peneliti perlukan.

Instansi : Kantor PPTSB/Gedung Tosin (Toga Sinaga) di Jalan Bunga Terompet, Medan Selayang Kota Medan, Sumatera Utara

Nama Program : Program PPTSB Sumut 1 dari berbagai Bidang.

Lokasi : Kantor PPTSB/Gedung Tosin (Toga Sinaga) di Jalan Bunga Terompet, Medan Selayang Kota Medan, Sumatera Utara

Tanggal : 15 Juni 2022

No	Yang Diamati	Ya	Tidak	Bukti / Indikator
1	Flyer Instansi / Brosur	✓		Dilihat pada saat observasi turun lapangan langsung
2	Struktur Organisasi – Tupoksi	✓		Dilihat pada saat observasi turun lapangan langsung
3	Sikap Pegawai	✓		Baik, ramah, dan sangat membantu
4	Website Instansi	✓		https://www.pptsbdumut.com/halaman/detail/visi-dan-misi https://www.galasi.bot.co/
5	Sosial Media Instansi	✓		Facebook
6	Sarana dan Prasarana <ul style="list-style-type: none"> a. Kantor b. Ruang Kerja c. Ruang Tunggu d. Parkir e. Toilet f. Wisma 	✓		Dilihat pada saat observasi turun lapangan langsung

LAMPIRAN II
PEDOMAN WAWANCARA

**PERAN KELEMBAGAAN LOKAL DALAM PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA DI PPTSB (PERSADAAN
POMPARAN TOGA SINAGA DAN BORU)
WILAYAH SUMUT 1**

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : Drs. R. O Sinaga, M. Pd
2. Jenis Kelamin : Laki - Laki
3. Umur : 52 Tahun
4. Pekerjaan : Dosen
5. Pendidikan : S2

B. Pertanyaan – Pertanyaan

1. Bagaimana Peran Kemitraan Kelembagaan Lokal Bersama Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Studi Kasus PPTSB (Persadaan Pomparan Toga Sinaga dan Boru) Sumut 1?
2. Apa Yang Menjadi Faktor Penghambat dan Pendukung Peran Kemitraan Kelembagaan Lokal Bersama Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Studi Kasus PPTSB (Persadaan Pomparan Toga Sinaga dan Boru) Sumut 1?
3. Apakah PPTSB (Persadaan Pomparan Toga Sinaga dan Boru) Membangun Kemitraan Bersama Pemerintah Daerah?
4. Apakah ada pelatihan pembangunan SDM?
 - 1) Pelatihan Lembaga Hukum
 - 2) Pelatihan Jurnalistik
 - 3) Pembekalan Beasiswa Pendidikan
 - 4) UMKM (Peternak Telur)

Dari Sejumlah Pelatihan Ini Adakah Bantuan dari Pemerintah?

5. Bagaimana perilaku setiap anggota PPTSB dalam kegiatan adat istiadat?
6. Apakah cara Pengurus PPTSB Sumut 1 dalam mengajak setiap yang bermarga sinaga agar masuk kedalam organisasi?
7. Apa kendala Pengurus PPTSB Sumut 1 dalam melakukan setiap kegiatan?



LAMPIRAN III
KANTOR PPTSB/ GEDUNG
TOSIN (TOGA SINAGA)



Dokumentasi Kantor PPTSB/Gedung Tosin (Toga Sinaga)

LAMPIRAN IV
RUANGAN PPTSB SUMUT 1



Dokumentasi Di Ruangan PPTSB Sumut 1

LAMPIRAN V
SURAT IZIN PENGAMBILAN
DATA/RISET



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1070 /FIS.1/01.10/IX/2022
Lamp :-
Hal : Pengambilan Data/Riset

16 September 2022

Yth,
Ka. PPTSB (Persadaan Pomparan Toga Sinaga dan Boru) Wilayah sumut I
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Kristina Sinaga
N P M : 198510012
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset ke Kantor PPTSB (Persadaan Pomparan Toga Sinaga dan Boru) Wilayah Sumut I, dengan judul Skripsi "**Peran Kemitraan Kelembagaan Lokal Bersama Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Sumberdaya Manusia Studi Kasus Lembaga PPTSB (Persadaan Pomparan Toga Sinaga dan Boru di Wilayah Sumut**"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Juliana Hasibuan, M.Si

CC : File,-



Lampiran VI Surat Selesai Pengambilan Data/Riset

PERAN KELEMBAGAAN LOKAL DALAM PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
MANUSIA
DI PPTSB (PERSADAAN POMPARAN TOGA SINAGA DAN BORU) WILAYAH SUMUT 1



PENGURUS WILAYAH
PARSADAAN POMPARAN TOGA SINAGA DOHOT BORU
(PPTSB) WILAYAH SUMATERA UTARA-1
Sekretariat: Jl. BungaTerompet No. 139 Kel. Sempakata, Kec. Medan
Selayang, Kota Medan - Sumatera Utara, Telp. 081370313559,

Nomor : 020. A1/SE/PW/PPTSB/X/2022 Medan, 24 Oktober 2022
Lampiran : --
Perihal : Pengambilan Data/Riset

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area
di
Tempat

Dengan hormat,

Sesuai dengan Surat Bapak No. 1036/FIS.1/01.10/IX/2022 tentang Pengambilan Data/Riset an: Kristina Sinaga, NPM. 198510012, Program Studi: Ilmu Pemerintahan, dengan ini kami dari Lembaga Parsadaan Pomparan Toga Sinaga dohot Boru (PPTSB) Wilayah Sumut-1 menyampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas telah selesai melaksanakan kegiatan pengambila Data/Riset untuk dapat digunakan dalam penyusunan Skripsi.


Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Salam dari kami,
Pengurus PPTSB Wilayah Sumut-1

Ketua,

SAIRON SINAGA



Sekretaris

Drs. RO. SINAGA, M.Pd

Lampiran VII
Dokumentasi Wawancara Informan 1



Lampiran VIII
Dokumentasi Wawancara Informan 2



Lampiran IX
Dokumentasi Wawancara Informan 3



Lampiran X
Dokumentasi Wawancara Informan 4 dan 5



Lampiran XI
Dokumentasi UKM Srikandi PPTSB Sumut 1

